

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan mutu kesehatan. Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dibidang kesehatan, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau untuk mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlunya dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan di apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang berfungsi sebagai tempat praktik pekerjaan kefarmasian bagi apoteker dan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (Permenkes RI, 2016). Salah satu hal yang menarik minat masyarakat untuk menjadikan apotek sebagai salah satu akses utama penyediaan obat dalam pelayanan kefarmasian (Silverman *et al.*, 2019). Semakin banyak apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian yang baik diharapkan apotek dapat bertahan dan bersaing dengan apotek yang lain.

Indikator kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan apotek salah satunya adalah jumlah konsumen atau masyarakat umum yang mengunjungi apotek. Kunjungan masyarakat atau konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan resep maupun tanpa resep. Jumlah kunjungan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik jumlah penduduk yang ada maupun jumlah fasilitas pendukung (Manan *et al.*, 2021).

Tingginya permintaan obat dikalangan masyarakat dan tingginya jumlah apoteker menjadi salah satu faktor pemicu semakin banyak jumlah apotek yang tersebar. Namun, pada dasarnya sarana produksi dan distribusi kefarmasian di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah (Kemenkes RI, 2022). Keberadaan apotek dalam memberikan pelayanan kefarmasian menjadi salah satu faktor kelangsungan kehidupan sosial dalam masyarakat, dengan jumlah apotek yang banyak tanpa informasi yang akurat dan relevan mengenai tata letak apotek dan lokasi penyebaran apotek akan menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat sekitar. Terdapat kesulitan dalam menemukan titik lokasi apotek disuatu wilayah mengakibatkan sejumlah apotek tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan menjadikan turunnya daya saing dengan apotek lain (M.Ramaddan julianti *et al.*, 2018).

Persebaran apotek yang tidak merata dapat berdampak terhadap perkembangan dan mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Jarak apotek menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam meningkatkan suatu bisnis apotek. Jarak apotek yang terlalu dekat dapat menimbulkan tingginya

kompetisi antar apotek selain itu dapat meningkatkan regulasi apotek, sedangkan jarak apotek yang terlalu jauh dapat mempersulit masyarakat dalam memperoleh akses layanan kefarmasian di apotek (Todd *et al.*, 2015).

Faktor lokasi sebagai salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu apotek, hal tersebut berkaitan dengan distribusi jumlah dan pemerataan lokasi apotek. Pelayanan kesehatan termasuk apotek harus memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat, peraturan yang mengatur distribusi apotek diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.14 Tahun 2021 mengenai penilaian kesesuaian apotek menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan menjamin akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian, serta memperhatikan rasio antara persebaran jumlah Apotek dibanding dengan jumlah penduduk” (Kemenkes, 2021). Selain itu faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi usaha dapat meninjau beberapa hal seperti kedekatan dengan perumahan, sekolah, perkantoran dan kemudahan dalam membagi waktu tempuh, serta keterjangkauan (Manan *et al.*, 2021). Aksesibilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas dalam mengakses fasilitas kesehatan seperti apotek. Pelayanan kefarmasian di suatu wilayah dapat dilihat dari perbandingan jumlah apotek dengan jumlah penduduk yaitu 1:10.000 penduduk menurut Kemenkes.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bulu *et al* (2022), hasil menunjukkan distribusi apotek di Kota Palopo masih belum merata terdapat

kecamatan yang tidak memiliki apotek. Sebaran apotek masih berpusat di Ibu Kota yang berada di pusat keramaian seperti instansi pemerintahan, rumah sakit dan klinik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Surabaya distribusi apotek masih belum merata dan mengelompok di pusat kota, berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah apotek yang ada, hasil menunjukkan rata-rata jumlah apotek terhadap jumlah penduduk di wilayah Surabaya adalah 1:7.221. Hal tersebut, menunjukkan bahwa apotek baru di Surabaya masih dibutuhkan untuk mencapai rasio yang ideal (Setiawan *et al.*, 2022). Menurut penelitian Manan *et al* (2021) menyatakan bahwa sebagian besar apotek di Banyumas tersebar di wilayah perkotaan sekitar ibu kota Kecamatan Banyumas, hal tersebut diketahui adanya korelasi antara rata-rata jumlah apotek dan jumlah unit pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan konsumen. Selain itu terdapat korelasi antara rasio jumlah penduduk, jumlah apotek, kepadatan penduduk dan jumlah sarana layanan kesehatan dengan jumlah resep.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat dengan luas wilayah 35.960 km² memiliki kepadatan jumlah penduduk sebanyak 81.202 yang tersebar di 11 Desa/Kelurahan. Penambahan sarana dan fasilitas kesehatan khususnya apotek perlu dilakukan perencanaan sebagai solusi dalam pemecahan masalah penyebaran apotek yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis distribusi apotek berdasarkan informasi geografis dan jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai salah

satu dasar untuk menjadikan rekomendasi dalam pendirian apotek serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan apotek dan penyebaran apotek yang merata dengan mengetahui daerah mana yang masih layak didirikan apotek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil distribusi apotek berdasarkan informasi geografis dan jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat?
2. Bagaimana aksesibilitas masyarakat dengan apotek yang dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah apotek di Kecamatan Ungaran Barat berdasarkan standar Kementerian Kesehatan?
3. Bagaimana profil apotek berdasarkan jumlah kunjungan konsumen dan jumlah resep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis gambaran distribusi apotek berdasarkan informasi geografis dan jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat.
2. Untuk menganalisis aksesibilitas masyarakat yang dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah apotek di Kecamatan Ungaran Barat berdasarkan standar Kementerian Kesehatan.
3. Untuk menganalisis gambaran apotek berdasarkan jumlah kunjungan konsumen dan jumlah resep.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
 - a. Sebagai informasi mengenai gambaran pola persebaran lokasi apotek.

- b. Sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam uji kelayakan prosedur pendirian apotek.
2. Bagi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
 - a. Sebagai informasi dalam pemberian surat rekomendasi pendirian apotek baru dilihat dari profil distribusi apotek.
 - b. Sebagai informasi untuk mempertimbangkan surat rekomendasi pendirian apotek dilihat dari jumlah penduduk.
3. Bagi Apoteker Pengelola Apotek
 - a. Sebagai salah satu elemen utama dalam pertimbangan pendirian apotek baru dilihat dari profil distribusi apotek.
 - b. Sebagai informasi tambahan mengenai keberadaan apotek untuk menambah tingkat kesejawatan profesi apoteker.
4. Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai tambahan informasi mengenai lokasi apotek.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik modal jika ingin membuka apotek baru.
5. Bagi Peneliti

Sebagai informasi tambahan mengenai distribusi apotek